

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUPPORTING SUSTAINABILITY LOCAL ECONOMY AMID COVID-19 PANDEMIC

Yuyu Jahratu Noor Santy^{1*}, Mochamad Doddy Syahirul Alam²

¹Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

²Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

E-mail: yuyujahratu@gmail.com¹, doddyfisip@gmail.com²

ABSTRACT

Local economic sustainability is the responsibility of all parties, namely the government, the private sector, and the community. The COVID-19 pandemic that has lasted more than a year has eroded the endurance of business actors to continue to exist and be productive. The purpose of this study is to describe the latest efforts made by the government, the private sector, and the community within the framework of collaboration in Indonesia. The method used in this research is literature review by taking secondary data sourced from scientific articles in journals, proceedings, bulletins, government agency work reports, government regulations, electronic newspapers, electronic magazines, and various other sources that complement the research findings. The results show that four provinces that have very high fiscal capacity are currently collaborating for economic sustainability. This collaboration is carried out in various economic sub-sectors such as finance, agriculture, and the creative industry for processing waste recycling. The conclusion that can be drawn is that collaborative governance that has been carried out by several major provinces in Indonesia, namely DKI Jakarta, West Java, Central Java, and East Java, has been able to meet various public needs. Collaborative governance is currently possible without being limited to administrative areas. This latest effort is different from previous collaborative governance models or methods.

Keywords: collaborative governance, local economy, COVID-19

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM Mendukung Keberlanjutan EKONOMI Lokal di Tengah Pandemi COVID-19

ABSTRAK

Keberlanjutan ekonomi lokal menjadi tanggung jawab semua pihak yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun telah menggerus daya tahan para pelaku usaha untuk tetap eksis dan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai upaya terkini yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kerangka kolaborasi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review* dengan mengambil data sekunder yang bersumber pada artikel ilmiah dalam jurnal, prosiding, buletin, laporan kerja instansi pemerintah, peraturan pemerintah, koran elektronik, majalah elektronik, dan berbagai sumber lainnya yang melengkapi temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat provinsi yang memiliki kemampuan fiskal yang sangat tinggi saat ini telah melakukan kolaborasi guna keberlanjutan ekonomi. Kolaborasi ini dilakukan di berbagai sub sektor ekonomi seperti keuangan, pertanian, dan industri kreatif pengolahan daur ulang sampah. Simpulan yang dapat diambil adalah *collaborative governance* yang telah dijalankan oleh beberapa provinsi besar di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah mampu memenuhi berbagai kebutuhan publik. *Collaborative governance* saat ini sangat mungkin terjadi tak terbatas wilayah administrasi. Upaya terkini tersebut berbeda dengan model atau cara-cara *collaborative governance* sebelumnya.

Kata kunci: *collaborative governance*, ekonomi lokal, COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memaksa beberapa daerah di Indonesia yang menjadi penyokong perekonomian nasional diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keempat provinsi ini adalah kelompok provinsi yang memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi (Menteri Keuangan, 2020), tapi mengalami tekanan luar biasa akibat COVID-19 dari sisi ekonomi.

Sebagaimana Tabel 1 berikut ini, Jakarta memiliki Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang paling tinggi (6,207), Jawa Barat (4,676), Jawa Tengah (2,943), dan Jawa Timur 2,885.

Tabel 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Nama Daerah	Indeks KFD	Kategori KFD
1.	DKI Jakarta	6,207	Sangat Tinggi
2.	Jawa Barat	4,676	Sangat Tinggi
3.	Jawa Tengah	2,943	Sangat Tinggi
4.	Jawa Timur	2,885	Sangat Tinggi

Sumber: Menteri Keuangan (2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 54 persen dari target Rp. 31,13 triliun. Tingkat defisit DKI Jakarta tahun 2020 juga naik menjadi Rp. 11,7 triliun atau sebesar 0,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDRB) di Jakarta. Kemudian APBD DKI tahun 2021 juga diproyeksikan mengalami defisit Rp. 8,4 triliun atau sebesar 0,3 persen dari PDRB (Prayoga, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jawa Barat di 2020 berkontraksi minus 2,44 persen atau menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai sebesar 5,07 persen. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang menurunkan ekonomi di Indonesia (Bebey, 2021).

Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berkontraksi menjadi -3,34 persen. Sektor ekonomi yang berkontraksi khususnya sektor industri. Perdagangan dan Konstruksi masing-masing sebesar -6,10 persen, -2,27 persen dan -4,40 persen. Kontraksi paling dalam dialami komponen ekspor barang dan jasa hingga sebesar 16,12 persen. Kondisi tersebut menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan dari 10,58 persen pada September 2019 menjadi 11,84 persen pada September 2020, dan tingkat pengangguran terbuka naik dari 4,44 persen pada Agustus 2019 menjadi 6,48 persen pada Agustus 2020 (Purbaya, 2021).

BPS Jawa Timur mencatat kinerja perekonomian sepanjang 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,80 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 11,6 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,87 persen. Lapangan usaha yang masih tumbuh tinggi adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,83 persen. Kemudian diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,70 persen serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,03 persen (Ibrahim, 2021).

Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi setiap negara termasuk Indonesia. Diantaranya, pandemi mendesak negara-negara di dunia melaksanakan proteksionisme perdagangan, karena mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk kembali mendesak kegiatan kerjasama multilateral sehingga penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi dapat dilakukan di dunia. Tantangan lainnya adalah tingkat kasus penularan virus corona yang tinggi di sejumlah negara ASEAN akan menghambat upaya pemulihan ekonomi. Kini beberapa negara di kawasan Eropa bahkan menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Namun pandemi COVID-19 juga membuka peluang pergeseran dan percepatan ekonomi tradisional menjadi ekonomi digital (Uly, 2021).

Setidaknya ada tiga hal besar dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi sebagaimana

dilansir oleh CNN Indonesia (2020), diantaranya adalah *Pertama*, pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan satu kelompok dari satu strata ke strata sosial lainnya. *Kedua*, identifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Krisis bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor ekonomi yang selama ini belum digarap. *Ketiga*, menyelaraskan target-target baru untuk mendorong kinerja ekonomi.

Tantangan ekonomi nasional tentu juga dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di daerah. Tantangan daerah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 tidaklah kecil. Tantangan tersebut diantaranya kemandirian fiskal daerah yang masih rendah maupun pembangunan daerah yang belum merata. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu berinovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah diantaranya melalui *creative financing*, mengelola potensi daerah melalui penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perencanaan pembangunan yang lebih merata, menekankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat tersalurkan dan terealisasi dengan baik serta pentingnya koordinasi seluruh *stakeholder* (No, 2021).

Upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan publik pasti membantu menyelesaikan penghalang antara publik dan swasta. Hal tersebut bisa terus dilakukan dengan mendorong perusahaan swasta ataupun organisasi nirlaba swasta untuk mencapai tujuan publik secara kolaboratif dengan pemerintah untuk bekerjasama dalam berbagai proyek dan program bersama. Hal ini sangat menguntungkan bagi kehidupan demokrasi kita dengan terus meluaskan pandangan bahwa pemerintah bukanlah “kita vs mereka”; tapi sebaliknya pemerintah adalah “kita” dan “mereka” untuk saling bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan termasuk perekonomian (Donahue, Zeckhauser, & Breyer, 2011). Sebagaimana diungkapkan oleh Munoz, (2017) bahwa *collaborative governance* itu setidaknya meliputi: *legal structure, equity model, governance structure and mechanism; decision-making process; consultation, and CSR and engagement strategies*. Secara lebih

sederhana Donahue & Zeckhauser (2011) mengatakan bahwa *collaborative governance* itu terdiri atas *collaboration for productivity, collaboration for information, collaboration for legitimacy*, dan *collaboration for resources*. Apa yang disampaikan oleh beberapa pakar tersebut setidaknya bisa menjadi pilihan yang bisa diaplikasikan dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas maka dibentuklah Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat KPCPEN) sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyakit korona virus 2019 dan Pandemi COVID-19 di Indonesia. Komite ini mengintegrasikan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak COVID-19 dengan kewenangan kementerian/lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini. Dengan demikian gugus tugas tersebut, beserta delapan belas lembaga negara lainnya, dibubarkan dan beberapa lembaga dialihkan kewenangannya pada komite ini (Perpres, 2020).

Selanjutnya pada pasal 8 Perpres Nomor 108 Tahun 2020 (Presiden RI, 2020), Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
- c. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
- d. Menetapkan dan menetapkan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam

rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Langkah yang diambil oleh pemerintah dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) adalah salah satu contoh bahwa pemerintah pusat telah menerapkan prinsip *collaboration for legitimacy, information, and resources*. Namun demikian hal tersebut adalah langkah awal yang ditujukan setidaknya untuk memperkuat aspek kelembagaan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana upaya kolaborasi dan integrasi secara kelembagaan ini bisa gayung bersambut dengan berbagai kebijakan dan upaya strategis-taktis dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Karena seringkali situasi dan kondisi daerah khususnya kapasitas pemerintah daerah dalam menggunakan sumber dayanya sangatlah berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ada daerah yang bergerak cepat bangkit secara kreatif dan inovatif menggerakkan perekonomiannya, tapi ada juga daerah yang cenderung lamban dalam mengendalikan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi inilah yang mendorong perlu sinergitas dalam kolaborasi oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kolaborasi *stakeholder* diharapkan mampu menemukan potensi terbesar yang dimiliki setiap daerah untuk memulai ide-ide kreatif di berbagai subsektor ekonomi. Baik itu dalam usaha perdagangan, pertanian dan perkebunan, peternakan, penyedia jasa telekomunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Yang kesemua sub sektor ekonomi tersebut tidak semuanya dimiliki setiap daerah.

Tiada pemulihan ekonomi, tanpa mengatasi pandemi, hal ini disampaikan oleh Rachbini (2021) pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF). Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai jatuh para triwulan kedua 2020, sebesar -5,32 persen yang kemudian berlanjut pada triwulan ketiga, sebesar -3,49 persen. Pertumbuhan negatif yang semakin kecil itu menandakan bahwa perekonomian berjalan lebih baik, tetapi bukan berarti sudah terjadi proses pemulihan menuju pertumbuhan positif. Semua itu sangat tergantung pada keberhasilan

atau kegagalan kebijakan mengatasi pandemi COVID-19.

Perkembangan kasus terkonfirmasi positif sempat mengalami puncaknya pada akhir bulan Januari 2021. Namun memasuki awal bulan Februari 2021 upaya penanganan COVID-19 secara nasional telah mengalami perbaikan dengan jumlah kasus konfirmasi positif yang terus mengalami penurunan hingga bulan April 2021 ini. Hal ini tentu bisa menjadi momentum bagi semua pihak (*stakeholder*) untuk bangkit dan bergerak mendorong perekonomian lokal berbasis pada potensi keunggulan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk menstimulus perekonomian nasional diantaranya diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut dilakukan dengan memperluas relaksasi diskon PPnBM ditanggung pemerintah bagi sektor otomotif untuk kapasitas mesin di bawah 1.500 cc hingga 2.500 cc, per 1 April 2021. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Kompas, 2021).

Sektor pariwisata juga mulai dibuka secara bertahap oleh pemerintah daerah atas seijin pemerintah pusat. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ancaman penyebaran korona virus, apakah mengalami penurunan dan adanya jaminan oleh pemerintah daerah untuk tetap menjaga situasi tetap kondisi kondusif dengan penegakan protokol kesehatan di masing-masing destinasi wisata. Sektor pariwisata memegang peranan yang sangat strategis karena melibatkan banyak *stakeholder*, banyak pelaku usaha seperti pedagang, pengelola wisata, pengelola hotel dan penginapan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, pengrajin, seniman dan pelaku usaha lainnya yang mendukung sektor pariwisata.

Pada akhirnya inilah momentum dimana pandemi COVID-19 mulai terkendali agar pemerintah daerah berkolaborasi secara aktif

menggerakkan perekonomian di daerah yang otomatis secara bertahap akan menggerakkan perekonomian nasional. Ini adalah tatanan kehidupan baru (*new normal*) bukan *back to normal* karena faktanya korona virus belum hilang sepenuhnya ditengah kita, bahkan kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan korona virus. Kuncinya tentu tetap menegakkan protokol kesehatan COVID-19 kapan pun dan di mana pun kita beraktivitas. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Mendesain Tata Kelola Kolaboratif

Collaborative governance telah muncul sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan masalah publik di era modern, dimana pemerintah didorong untuk terlibat dengan organisasi lintas sektor (Andolina, 2010; Subatin & Pramusinto, 2019), mengungkapkan ada delapan prinsip desain kebijakan yang diuraikan ini bersifat luas dan integratif, tetapi tidak mencakup semua. Beberapa ahli teori dan praktisi dapat mengaturnya secara berbeda, mengkategorikannya dalam judul yang berbeda, atau menggunakan terminologi yang mereka yakini lebih ketat secara teknis atau lebih bergema di antara orang dan praktisi, dua kriteria yang mereka yakini penting. Nilai-nilai, yang semuanya berhubungan dengan kekuasaan bersama dalam beberapa cara, adalah menu selektif yang berkombinasi berbeda mungkin dapat diterapkan untuk beberapa masalah tata kelola dan kebijakan tetapi tidak untuk yang lain.

Setidaknya ada delapan prinsip dari *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) dan desain kebijakan yang dapat diimplementasikan di berbagai bidang sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Delapan Prinsip Inti dari Tata Kelola Kolaboratif dan Desain Kebijakan

<i>Core principal</i>	<i>Policy design</i>
<i>Coproduce public goods</i>	<i>Policy should enable the work of citizens themselves in coproducing public goods.</i>
<i>Mobilize community assets</i>	<i>Policy should enable communities to mobilize their</i>

<i>Core principal</i>	<i>Policy design</i>
	<i>own assets for problem solving and development.</i>
<i>Share professional expertise</i>	<i>Policy should mobilize expert knowledge to enlighten and empower everyday citizens and to use citizen's own local knowledge.</i>
<i>Enable public deliberation</i>	<i>Policy should enable and expect citizens to engage in the public reasoning upon which good policy choices, democratic legitimacy, and effective implementation depend.</i>
<i>Promote sustainable partnership</i>	<i>Policy should promote collaborative work and partnerships among citizens, organized stakeholders, and public agencies.</i>
<i>Build fields and governance networks strategically</i>	<i>Policy should mobilize field-building assets strategically to enable citizens, organized stakeholders, and public agencies.</i>
<i>Transform institutional cultures</i>	<i>Policy should catalyze public and nonprofit agencies to become learning organizations for community empowerment and civic problem solving and draw market actors into civic partnerships and culture change as well.</i>
<i>Ensure reciprocal accountability</i>	<i>Policy should promote mutual accountability for collaborative work among the broad range of democratic actors and partners.</i>

Sumber: Andolina (2010)

Konsep tata kelola kolaboratif dan desain kebijakan ini berlaku dalam berbagai situasi, tetapi tidak selalu mudah. Tidak ada yang namanya kecocokan sempurna, dan tidak ada model tunggal yang berhasil diterapkan ke skenario lain. Tidak ada teori yang dapat menggantikan penilaian politik yang baik, penekanan ditempatkan pada di mana dan kapan harus menggunakan variabel dan konfigurasi yang berbeda. Tantangan untuk menciptakan kemungkinan baru bagi pemerintahan bersama sipil sejalan dengan realisme politik. Batasan koalisi dan sumber daya selalu menjadi batu sandungan dalam rencana mereka. Semakin banyak kasus, pengetahuan, dan keputusan sipil cenderung berjalan seiring (Andolina, 2010).

Kolaborasi Untuk Produktivitas

Perusahaan swasta yang efisien. Pernyataan ini merupakan penghinaan total baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Kedua industri memiliki kekuatan yang berbeda. Kebanyakan organisasi swasta harus bersaing, baik untuk sumbangan atau penjualan. Salah satu aspek penting dari persaingan adalah transformasi sumber daya biasanya kinerja. ketidakmampuan mengundang kepunahan. Meskipun tuntutan pemerintah mencakup produktivitas penuh, transparansi, dan keadilan, banyak di antaranya yang lebih diutamakan. efisiensi yang efisien dapat menjadi masalah sekunder bagi pemerintah Kontrak yang mudah dari pemerintah juga memiliki manfaat besar di sektor bisnis. Seringkali, topik ini, khususnya, kemitraan publik-swasta adalah yang paling efektif bagi pemerintah yang ingin mencapai tujuan mereka. Kita membahas topik ini dengan dua studi kasus singkat tentang tata kelola kolaboratif yang berfokus pada keberhasilan, satu menyoroti, satu menggambarkan, dan yang lainnya kurang menguntungkan (Donahue et al., 2011).

Kolaborasi Untuk Sumber Daya

Semua itu bergantung pada apakah sumber daya dapat digunakan untuk membantu mewujudkan misi yang didukung secara luas, apakah itu yang paling efektif, dan apakah ada yang mendapat manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Baik atau buruk tergantung pada pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan. Bagian ini akan membahas tiga poin tentang kerja sama dengan perusahaan swasta dan mendapatkan akses ke pendanaan publik untuk mengamankan modal swasta (Donahue et al., 2011).

Oh & Bush (2016) mengatakan bahwa menurut literatur akademis, modal sosial dibutuhkan untuk aksi kolektif. Meskipun demikian, terlepas dari posisi penting ini, literatur belum mencoba menjelaskan jenis modal sosial apa yang ada dalam arti aktivitas kolektif, dan kapan digunakan dalam rezim kerja sama. Sebelum studi ini, artikel ini mengulas aspek teoritis tentang bagaimana modal sosial memungkinkan tata kelola kolaboratif misalnya, sejumlah jenis modal sosial yang berbeda dapat

memfasilitasi tujuan kolaboratif selama berbagai tahap kolaborasi.

Inovasi Kolaboratif Sebagai Alat Untuk Keberlanjutan Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Dalam Pemerintahan Daerah

Hofstad & Torfing (2015) mengatakan bahwa untuk menganalisis dan membandingkan tiga bidang kebijakan dengan lebih baik (menangani keberlanjutan ekonomi, sosial, dan / lingkungan) kami mengembangkan tipologi yang menggabungkan hierarki, kolaboratif, dan jaringan. Konsultasi pemangku kepentingan muncul sebagai tema utama dalam temuan studi ini. Proses pertumbuhan bisnis yang difokuskan pada profitabilitas tidak hanya persaingan, tetapi juga jaringan. Akhirnya menjadi jaringan kolaboratif untuk kebugaran

Klaim teoritis adalah bahwa jaringan kolaboratif memiliki potensi terbesar untuk mempromosikan solusi kreatif untuk masalah jahat dan sulit diatur karena adanya saling ketergantungan yang kuat, kesempatan untuk mempromosikan pembelajaran bersama, berbagi risiko dan keuntungan, dan pembentukan kepemilikan kolektif yang baru dan berani. solusi. Meskipun terdapat beberapa bukti empiris bahwa penyelesaian masalah kolaboratif dan kreativitas kebijakan strategis dan retorik difasilitasi oleh jaringan kolaboratif, buktinya masih jarang, mungkin karena faktor kontingen yang menghambat inovasi. Jadi, pertanyaannya tetap: ada syarat utama untuk mengembangkan kapasitas tata kelola yang menumbuhkan kreativitas di wilayah Norwegia. Tinjauan kami mengidentifikasi empat faktor penting (Hofstad & Torfing, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan *systematic literature reviews* adalah upaya untuk memahami konteks besar secara lebih luas dari berbagai sumber informasi dengan maksud untuk berkontribusi menjawab berbagai pertanyaan yang sudah terpecahkan maupun belum terpecahkan, termasuk ragam jenis pertanyaan riset lainnya (Petticrew & Roberts, 2008). Metode ini dimaksudkan untuk mampu memetakan area ketidakpastian dan

mengidentifikasi di area mana yang belum banyak dilakukan penelitian yang relevan (Petticrew & Roberts, 2008).

Penelitian ini dilakukan dengan sarana media *online* yang mengakses berbagai situs media sosial (*facebook, twitter*) yang digunakan oleh instansi pemerintah, pejabat pemerintah, termasuk juga berbagai situs koran elektronik nasional, serta laman berita elektronik lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Food Station Tjipinang Jaya bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Cilacap bekerjasama dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan beras bagi warga Jakarta. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berisi tentang ‘Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik’ pada tahun 2018. Kerjasama ini dilakukan salah satunya bermaksud untuk memotong mata rantai distribusi beras dari Cilacap ke Jakarta. Karena jika mata rantai terlalu panjang maka kedua pihak dalam hal ini warga Jakarta dan petani Cilacap tidak akan diuntungkan. Kondisi yang diharapkan adalah warga Jakarta bisa mendapat beras berkualitas dengan harga yang terjangkau dan petani Cilacap dapat meningkat kesejaherannya. (Ridlo, 2021) Hal tersebut sejalan dengan Koontz & Thomas (2021) yang menyatakan bahwa Kolaborasi sering dianggap sebagai tempat pengganti entitas pemerintah untuk menawarkan layanan publik, menciptakan barang publik, dan mengembangkan kebijakan. *Collaborative governance* mendapatkan daya tarik di sejumlah negara kesejahteraan saat ini, menyatukan pemangku kepentingan dari organisasi publik, komersial, dan/atau nirlaba untuk mengatasi masalah publik (Plotnikof & Zandee, 2016).

Pada Gambar 1 dapat dilihat dimana Gubernur Anies Baswedan melakukan panen raya hasil kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Food Station Tjipinang Jaya dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kabupaten Cilacap. Kolaborasi yang dirintis dari awal hanya sebuah konsep kegiatan ketika itu dilakukan secara serius dengan didasari pada tercapai kepentingan dan tujuan bersama maka pada akhirnya akan memberikan hasil yang maksimal yang memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Menjadi penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mengembangkan kolaborasi dalam berbagai skema kegiatan dengan banyak pihak dalam upaya memenuhi kebutuhan domestik DKI Jakarta.

Gambar 1. Panen Padi di Cilacap oleh Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Cilacap



Sumber: Ridlo (Liputan6.com, 2021)

Direktur Utama PT. Food Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menerangkan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Gapoktan Sumber Makmur Cilacap sejak tahun 2018 yaitu dengan area sawah seluas 250 hektar, pada tahun 2019 bertambah seluas 500 hektar, tahun 2020 seluas 850 hektar serta target kerjasama tahun 2021 yaitu 1.000 hektar. Pihaknya juga telah melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Sumber Makmur terkait pemilihan varietas padi serta memberikan pendampingan dalam pascapanen sehingga gabah yang dihasilkan berkualitas tinggi. Pada bulan April 2021 ini hasil panen sebesar 20 ton beras telah meluncur ke Jakarta dengan diangkut oleh 2 mobil truk (Ridlo, 2021).

Pola kolaborasi yang sama juga diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT. Food Station Tjipinang Jaya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk memperluas cakupan serapan gabah yang selanjutnya didistribusikan ke Jakarta. Kerjasama kedua belah pihak tersebut dilakukan dalam hal Resi Gudang (*Warehouse Receipt*)

System), penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Bupati Ngawi Ony Anwar dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran Food Station, Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun di Balai Desa Geneng, Dusun Alas Pecah, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi (Baswedan, 2021).

Biasanya pada saat panen raya gabah kering harga pasarnya sangat rendah. Dengan kerjasama sistem resi gudang, *Food Station* sebagai pengelola akan membantu menjadi *stand by buyer* dengan harga yang baik sehingga para petani tidak perlu susah-susah mencari pembeli. Dan petani juga nggak harus terburu untuk menjual gabah mereka dengan harga yang rendah, akan tetapi dapat terlebih dahulu menyimpannya untuk meningkatkan kualitas sehingga harganya juga akan stabil. Keuntungan lain yang didapat dengan sistem resi gudang ini, petani juga bisa memanfaatkan sebagai jaminan pinjaman dari lembaga keuangan untuk pembiayaan musim tanam berikutnya. Dengan sistem resi gudang kita bisa menyimpan rata-rata 600 ton, target tahun 2021 sebanyak 1.000 ton (Baswedan, 2021).

Jakarta sangat besar ketergantungannya dengan daerah lain di luar Jakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan komoditi pertanian, kami tidak ingin hanya menerima berasnya saja tanpa memikirkan kesejahteraan petaninya. Kerjasama antar daerah ini merupakan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta sebagai penyumbang perekonomian terbesar ingin memberikan manfaat bagi daerah lain khususnya peningkatan kesejahteraan petani (Baswedan, 2021).

Pada Gambar 2 kita bisa melihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bekerjasama dengan beberapa daerah penyangga ibukota, melainkan juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang letak jauh dari DKI Jakarta. Pola kerjasama ini tidak sekedar mempertimbangkan faktor jarak saja, akan tetapi lebih kepada nilai lebih (*value added*) dari kerjasama itu sendiri. Kabupaten Ngawi bisa jadi jaraknya jauh dari Jakarta, tetapi memiliki potensi komoditi beras yang sangat besar sehingga ini sangat membantu Jakarta dalam memenuhi kebutuhan beras dengan harga

yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan nota kesepahaman yang baik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Food Station Tjipinang Jaya dengan Gapoktan di Kabupaten Ngawi maka kendala biaya transportasi dan sistem persediaan beras di Kabupaten Ngawi dapat lebih mudah teratasi. Termasuk juga jadwal pengiriman beras ke Jakarta yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Manfaat secara keseluruhan dari kerjasama ini adalah mempermudah rantai pasokan beras ke Jakarta.

Gambar 2. Kerjasama Sistem Resi Gudang antara DKI Jakarta dengan Kabupaten Ngawi



Sumber: Baswedan (2021)

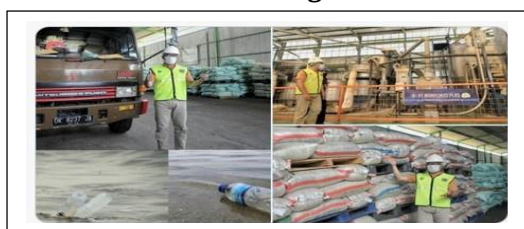
Jawa Barat

Jawa Barat memiliki tujuh potensi ekonomi baru pasca COVID-19 yaitu: 1) meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari tiongkok, 2) swasembada pangan, 3) swasembada teknologi, 4) mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan, 5) digital ekonomi, 6) penerapan ekonomi berkelanjutan, 7) pariwisata lokal. Berdasarkan data BPS periode Januari hingga Agustus 2020, Jabar menyumbang 16,28 persen atau 16,79 miliar dolar Amerika Serikat terhadap ekspor nasional, disusul Jawa Timur sebesar 12,95 persen dan Kalimantan Timur sebesar 8,44 persen. Jawa Barat memiliki modal pemulihan ekonomi yang belum tentu dimiliki daerah lain yakni sepertiga ekspor nasional yang terkait dengan ekonomi kreatif berasal dari Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021).

Kamil (2021) menjelaskan bahwa Jawa Barat terus berupaya menggerakkan ekonomi kreatif dengan upaya-upaya kolaborasi dengan daerah lain salah satunya dengan Provinsi Bali. Kolaborasi itu dilakukan dengan usaha pengolahan daur ulang sampah botol plastik yang didatangkan dari Bali untuk diolah menjadi botol air mineral. Setiap harinya tidak kurang

dari 60 ton sampah botol plastik dikirim dari Bali ke Padalarang, Jawa Barat. Teknologi canggih daur ulang sampah botol plastik tersebut dimiliki oleh Namasindo Plas, satu-satunya fasilitas di Indonesia yang mengolah sampah plastik dengan 5 tahap untuk kembali menjadi kemasan botol plastik siap pakai. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Gestel & Grotenbreg, (2021) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* menghasilkan solusi yang lebih imajinatif untuk masalah rumit dalam layanan publik, salah satunya persoalan pengelolaan sampah. Untuk mencapai *collaborative governance* yang inovatif sebagai jawaban atas masalah rumit memerlukan dukungan berbagai pihak diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat (Bell & Olivier, 2021; Novita Suratman & Darumurti, 2021).

Gambar 3. Pengolahan Sampah Plastik dari Bali di Padalarang, Jawa Barat



Sumber: Kamil (2021)

Pada Gambar 3 nampak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjukkan pabrik pengolahan sampah plastik yang sebagian besar bahan bakunya dikirim dari Bali. Ini satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Jawa Barat karena dengan munculnya industri tersebut maka terbuka lapangan pekerjaan yang secara langsung berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Di lain sisi industri tersebut menjadi bagian dari *green economy* karena membantu mengurangi dan menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Dengan adanya tumpukan sampah yang dikelola dan disalurkan secara baik menjadi berbagai barang olahan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dan sudah barang tentu barang olahan tersebut lebih memiliki nilai ekonomis setelah dibentuk menjadi berbagai macam rupa.

Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki semangat kolaborasi mencari solusi terbaik mengatasi dampak pandemi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Senada dengan yang disampaikan oleh Brown, Langridge, & Rudestam (2016) bahwa *collaborative governance* semakin populer. Pendekatan manajemen ini menyatukan entitas negara dan non-negara untuk membuat keputusan lingkungan. Kolaborasi adalah ide yang terkenal di sektor publik. Implementasinya terutama untuk tujuan menyelesaikan kesulitan di sektor publik, yang seringkali menuntut partisipasi semua pemangku kepentingan (Prastiyo, 2019; Prysmakova-Rivera, 2021). Ada beberapa program yang dilakukan dalam hal tersebut yakni penyaluran KUR yang mencapai 42,29 persen dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai pertumbuhan sebesar 50,96 persen. Selain itu OJK juga mengembangkan layanan konsultasi restrukturisasi kredit khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nama 'credit center', selain itu secara kontinyu mengadakan sosialisasi program subsidi bunga, dan menyusun program UMKM Bangkit diantaranya *businessmatching* antara Industri Jasa Keuangan dan UMKM, serta mendorong perluasan alternatif pembiayaan berbunga rendah (Purbaya, 2021).

Collaborative governance adalah gaya penyampaian kebijakan dan layanan yang bergerak menjauh dari lingkungan pemerintah atau pasar dan menuju lingkungan di mana publik, swasta, dan masyarakat lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan publik, termasuk dalam bidang keuangan (Gash, 2016).

Jawa Timur

Ada dua strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memulihkan ekonomi sebagai dampak pandemi, yaitu *potential losers* dan *winners*. *Potensial losers* terdapat tujuh bagian perekonomian di dalamnya, meliputi: pariwisata, konstruksi, transportasi (darat, laut, udara), pertambangan, keuangan, otomotif, dan UMKM. Sedangkan potensi *winners* ada enam meliputi: jasa logistik, jasa telekomunikasi, makanan dan minuman,

kimia, farmasi, dan alat kesehatan sampai produk tekstil. Kedua potensi ini juga terdapat sektor pertanian. Untuk potential *losers* akan ditindaklanjuti dan diidentifikasi oleh masing-masing Bupati dan Walikota untuk selanjutnya dibuat kebijakan dalam rangka merespon kebutuhan publik yang mendesak. Kebijakan yang dihasilkan ini akan diimplementasikan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Widiyana, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuat peta jalan (*roadmap*) kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Yakni ekonomi dan kerawanan sosial (konflik horizontal *distrust society*, munculnya kelompok yang memanfaatkan keadaan). Pemerintah juga menjaga basis komunikasi masyarakat untuk memperkuat pondasi perekonomian Jawa Timur. Mengamankan daya beli masyarakat melalui *social safety net* (kolaborasi program pusat-daerah), dan memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok melalui lumbung pangan Jawa Timur. Ada enam bagian basis komunikasi masyarakat yaitu PKH plus dengan sasaran lansia di 10 kabupaten kantong kemiskinan, program suplemen, pembinaan, pengawasan, dan fasilitas pelaksanaan BLT, Lumbungan Pangan Jatim menjangkau 38 kabupaten/kota dan bantuan pemerintah subsidi gaji/upah kerja (Widiyana, 2020). Dalam situasi darurat seperti wabah Covid 19, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah; kerjasama antar pemangku kepentingan sangat diperlukan (Brown et al., 2016; Megawati, Niswah, & Oktariyanda, 2020).

Gambar 4. Pertemuan Kepala BKPM dengan Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik



Sumber: Humas Pemerintah Kota Surabaya (2021)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 upaya pemulihan ekonomi di Jawa Timur juga mendapatkan dukungan dan intervensi dari Bahlil Lahadalia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertemu dengan tiga kepala daerah di Jawa Timur yakni Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik. Tiga daerah memegang peranan penting terhadap perekonomian Jawa Timur karena 40% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disumbang oleh tiga daerah tersebut. Walikota dan Bupati diminta oleh Kepala BKPM untuk fokus terhadap dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan terus menjaga iklim investasi yang ramah dan kondusif. Termasuk menjadi ekosistem investasi yang baik meliputi: aspek perizinan, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik adalah daerah yang saling berkaitan dalam hal industri, UMKM, dan transportasi, sehingga kolaborasi yang baik sangatlah diharapkan (Kompas.com, 2021a).

SIMPULAN

Kolaborasi lintas pemerintah daerah sebagaimana digambarkan diatas ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, kelompok tani, terbukti cukup efektif menciptakan ketahanan ekonomi di berbagai subsektor. Selanjutnya yang diperlukan adalah keberlanjutan model kolaborasi tersebut untuk diterapkan di berbagai bidang sub sektor ekonomi lainnya tidak hanya di bidang pertanian, industri ramah lingkungan, dan investasi. Tapi bisa dikembangkan ke subsektor ekonomi lainnya dengan melibatkan lebih banyak daerah lainnya.

Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) saat ini telah dijalankan oleh beberapa provinsi besar di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tata kelola kolaboratif saat ini berkembang dengan sangat cepat di masa pandemi tidak dibatasi oleh lingkup wilayah administrasi saja, akan tetapi sudah berkembang kolaborasi itu lintas provinsi dan lintas kabupaten. Konsep ini telah memberikan manfaat yang cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan publik di berbagai bidang. Kendala-kendala klasik seperti alur birokrasi yang

berbelit-belit, proses administrasi yang panjang dapat terselesaikan secara lebih cepat. Upaya terkini tersebut berbeda dengan model atau cara-cara *collaborative governance* sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan Gash (2016) yang menyampaikan bahwa desain dan implementasi pengaturan *collaborative governance* yang disengaja dan tidak disengaja dapat dihasilkan dari kesadaran yang lebih besar akan proses dan struktur, serta dari penerapan dan kinerja strategi manajemen dan peran kepemimpinan yang proaktif dan hati-hati, sambil mengakui pentingnya menyadari potensi kerugian, risiko, dan kendala. Tata kelola yang efektif harus bertanggung jawab, menghasilkan manfaat dan efektivitas publik, dan di banyak negara sah secara demokratis.

Selanjutnya dapat disarankan bahwa berbagai model *collaborative governance* bisa menjadi satu solusi konkrit dalam mencegah krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang terus mendera bangsa Indonesia. Langkah-langkah kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi di sektor pemerintahan, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andolina, M. (2010). Investing in Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance. In *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* (Vol. 39). <https://doi.org/10.1177/0094306110367909aaa>
- Baswedan, A. (2021, April 25). Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya menggandeng Pemerintah Kabupaten Ngawi. Retrieved April 26, 2021, from Anies Baswedan Facebook website: <https://www.facebook.com/aniesbaswedan/posts/325297115619979>
- Bebey, A. (2021, February 5). Terdampak Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Minus 2,44 Persen di 2020. Retrieved April 21, 2021, from Newspaper Article website: <https://www.merdeka.com/uang/terdampa>
- k-pandemi-pertumbuhan-ekonomi-jawa-barat-minus-244-persen-di-2020.html
- Bell, E. V., & Olivier, T. (2021). Following the paper trail: Systematically analyzing outputs to understand collaborative governance evolution. ... of *Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab054/6486568>
- Brown, A., Langridge, R., & Rudestam, K. (2016). Coming to the table: collaborative governance and groundwater decision-making in coastal California. *Journal of Environmental Planning and Management*, 59(12), 2163–2178. <https://doi.org/10.1080/09640568.2015.1130690>
- CNN Indonesia, S. (2020, July 17). Survei: Tiga Tantangan Besar Pemulihan Ekonomi usai Corona. Retrieved April 20, 2021, from E-Newspaper website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200717132853-532-525867/survei-tiga-tantangan-besar-pemulihan-ekonomi-usai-corona>
- Donahue, J. D., Zeckhauser, R. J., & Breyer, S. (2011). Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times. In *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gash, A. (2016a). Collaborative governance. *Handbook on Theories of Governance*, 454–467. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412>
- Gash, A. (2016b). Collaborative governance. *Handbook on Theories of Governance*, (June), 454–467. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412>
- Gestel, N. Van, & Grotenbreg, S. (2021). Collaborative governance and innovation in public services settings. *Policy and Politics*, 49(2), 249–265. <https://doi.org/10.1332/030557321X16123785900606>
- Hofstad, H., & Torfing, J. (2015). Collaborative innovation as a tool for environmental, economic and social sustainability in regional governance. 49-70, 19(4), 49–70.
- Ibrahim, A. M. (2021, February 6). BPS:

- Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terkonsentrasi 2,39 persen - ANTARA News. Retrieved April 21, 2021, from Web page website:
<https://www.antaranews.com/berita/1984784/bps-pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-terkonsentrasi-239-persen>
- Jawa Barat, P. P. (2021, January 2). Kaleidoskop 2020: Sambut Ekonomi Jabar 2021 dengan Optimistis. Retrieved April 21, 2021, from Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat website:
<https://jabarprov.go.id/index.php/news/40789/2021/01/02/Kaleidoskop-2020-Sambut-Ekonomi-Jabar-2021-dengan-Optimistis>
- Kamil, R. (2021, April 21). "60 Ton Sampah Botol Plastik kiriman dari Pulau Bali setiap minggu dikirim ke Jawa Barat untuk diolah oleh teknologi canggih di Padalarang untuk kembali menjadi botol air mineral. Retrieved April 24, 2021, from ridwan kamil on Twitter: website:
<https://twitter.com/ridwankamil/status/1384832975930417163?cn=ZmxleGlibGVfc mVjcw%3D%3D&refsrc=email>
- Kompas.com. (2021, March 18). Percepat Pemulihan Ekonomi, 3 Kepala Daerah di Surabaya Raya Akan Genjot Investasi. Retrieved April 24, 2021, from Kompas.com website:
<https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/153602678/percepat-pemulihan-ekonomi-3-kepala-daerah-di-surabaya-raya-akan-genjot?page=all>
- Kompas. (2021, April 2). Pemerintah Mulai Berlakukannya Diskon PPnBM Mobil, Ini Ketentuannya. *Kompas.Com*, pp. 1–1. Retrieved from
<https://money.kompas.com/read/2021/04/02/095858326/pemerintah-mulai-berlakukan-diskon-ppnbnm-mobil-ini-ketentuannya?page=all>
- M. Koontz, T., & W. Thomas, C. (2021). Improving the use of science in collaborative governance. *Handbook of Collaborative Public Management*, 313–330.
<https://doi.org/10.4337/9781789901917.00034>
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. ... *Conference on Social ...*
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>
- Menteri Keuangan, R. I. (2020). *PMK-No.-120-Th-2020-tentang-Peta-Kapasitas-Fiskal-Daerah* (pp. 1–25). pp. 1–25. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Muñoz, P., & Cohen, B. (2017). Mapping out the sharing economy: A configurational approach to sharing business modeling. *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 21–37.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.035>
- No, C. (2021). Urgensi dan Tantangan Program Organisasi Penggerak Tantangan Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Outlook Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia 2021. *Buletin APBN*, V(15), 1–16.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- oh, Y., & Bush, C. B. (2016). Exploring the Role of Dynamic Social Capital in Collaborative Governance. *Administration & Society*, 48(2), 216–236.
<https://doi.org/10.1177/0095399714544941>
- Perpres. (2020). *Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid Dan Pemulihan Ekonomi Nasional* (pp. 1–22). pp. 1–22. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI, Deputi Bidang Perekonomian.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. In *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide* (First).
<https://doi.org/10.1002/9780470754887>
- Plotnikof, M., & Zandee, D. (2016). Meaning negotiations of collaborative governance: A discourse-based ethnography. *Doing*

- Organizational Ethnography*, 137–158.
<https://doi.org/10.4324/9781315677279>
- Prastiyo, D. (2019). Collaborative Governance and Infrastructure Development in Indonesia: A Review. *Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 30–32.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2019.004.01.6>
- Prayoga, R. (2020, July 27). Akibat COVID-19, pertumbuhan ekonomi Jakarta turun. Retrieved April 21, 2021, from ANTARA News website:
<https://www.antaranews.com/berita/1635630/akibat-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-jakarta-turun>
- Presiden, R. (2020). *Perpres Nomor 54 Tahun 2020*. Retrieved from
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/176089/Perpres_Nomor_54_Tahun_2020.pdf
- Prysmakova-Rivera, S. (2021). Collaborative governance: processes, benefits and outcomes. *Handbook of Theories of Public Administration and Management*, 80–96.
<https://doi.org/10.4337/9781789908251.00017>
- Purbaya, A. A. (2021, March 8). Dihantam COVID-19, Begini Kondisi Ekonomi Jawa Tengah. Retrieved April 21, 2021, from Webpage website:
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5486023/dihantam-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-jawa-tengah>
- Rachbini, D. J. (2021, January 7). “Tiada Pemulihan Ekonomi, Tanpa Mengatasi Pandemi.” Retrieved April 22, 2021, from CNBC Indonesia website:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210107132706-4-214173/tiada-pemulihan-ekonomi-tanpa-mengatasi-pandemi>
- Ridlo, M. (2021, April 17). Ketika Gubernur Anies Baswedan Relu Blusukan Panen Padi di Cilacap - Regional Liputan6.com. Retrieved April 24, 2021, from Liputan6.com website:
<https://www.liputan6.com/regional/read/4534473/ketika-gubernur-anies-baswedan-relu-blusukan-panen-padi-di-cilacap#>
- Subatin, B., & Pramusinto, A. (2019). Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center of The Manado Environment and Forestry Research and Development Institute. *Policy & Governance Review*, 3(1), 43.
<https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.126>
- Uly, Y. A. (2021, February 16). Seperti Apa Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi ASEAN Pasca-pandemi? Halaman all - Kompas.com. Retrieved April 20, 2021, from E-Newspaper website:
<https://money.kompas.com/read/2021/02/16/095000826/seperti-apa-peluang-dan-tantangan-pemulihan-ekonomi-asean-pasca-pandemi?page=all>
- Widiyana, E. (2020, November 2). Cara Pemprov Jatim Pulihkan Ekonomi yang Terdampak Pandemi COVID-19. Retrieved April 24, 2021, from Detiknews.Com website:
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5238775/cara-pemprov-jatim-pulihkan-ekonomi-yang-terdampak-pandemi-covid-19>